

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara kita terdapat peraturan mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yaitu tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat 1 yaitu berbunyi: “ fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.² Dengan begitu negara menjadi memiliki kewajiban untuk memperhatikannya. Namun jika kita melihat fakta di lapangan tidak semua anak-anak terlantar dan fakir miskin di perhatikan oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum bisa memenuhi kewajiban secara keseluruhan untuk meminimalisir jumlahnya. Kurang optimalnya negara dalam menjalankan program pemerintah dalam meminimalisir jumlah fakir miskin dan anak terlantar, sehingga pemerintah membutuhkan bantuan serta partisipasi masyarakat dalam pengoptimalan kewajiban tersebut. Dengan begitu masyarakat berusaha untuk dapat berkontribusi dalam menjalankan kewajiban negara, dengan mendirikan suatu organisasi sosial. Organisasi sosial ini dapat dikatakan sebagai organisasi nonlaba, yang di lingkungan masyarakat dapat mengatasi kemiskinan, fakir miskin, dan anak terlantar yang disebut dengan istilah yayasan.

² Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat 1

Organisasi nonlaba merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa individu dengan tujuan tertentu yang bekerjasama untuk dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan, pelaksanaan dari organisasi ini tidak mengharapkan laba atau keuntungan semata. Organisasi nonlaba sudah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Dalam dunia kesehatan misalnya banyak rumah sakit yang dinaungi oleh yayasan. Dalam dunia pendidikan, taman siswa juga dapat dijadikan contoh. Selain itu juga dalam bidang sosial, banyak organisasi masyarakat yang mendirikan panti asuhan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dari contoh-contoh berikut menunjukkan bahwa organisasi nonlaba sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia.³

Meskipun sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, kepedulian terhadap pembinaan serta pengembangannya masih sangat minim. Seperti pengaturan terhadap yayasan baru dilakukan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian direvisi dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Keduanya belum dilaksanakan secara sempurna karena masih sangat banyak aturan pelaksanaan yang belum diterbitkan. Salah satunya yang baru diselesaikan adalah Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008. Demikian juga untuk bentuk lembaga nonlaba yang disebut sebagai ormas (organisasi massa) yang terakhir

³ Ihda, Arifin, *Akuntabilitas Organisasi Nonlaba*, (Yogyakarta: STIM YPKN, 2020), hal. 18-19

diatur dalam UU Tahun 1985 dan baru tahun 2011 dimulai penyempurnaannya dengan revisi Undang-undang.⁴

Organisasi nonlaba ini berbeda dengan organisasi bisnis. Dapat kita lihat dari cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasinya, yaitu diperoleh dari sumbangan anggota yayasan, donatur, dan penyumbang lainnya dengan sukarela tidak mengharapkan imbalan apapun. Karena sumber dana yang diperoleh dari masyarakat maka pengurus harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dalam menjalankan kegiatan operasional yayasan tersebut.

Masalah yang muncul dalam organisasi nonlaba salah satunya adalah keberlanjutan finansial. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik, laporan keuangan menempati peranan yang sangat penting dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan memberikan peran yang sangat penting dalam membantu menyediakan informasi yang relevan kepada pemberi sumber daya yang sama sekali tidak mengharapkan imbalan, anggota, dan pihak lain yang membutuhkan.

Akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan organisasi nonlaba. Akuntabilitas adalah proses memenuhi kebutuhan informasi (baik secara hukum maupun secara moral). Untuk mencapai akuntabilitas, laporan keuangan dapat berfungsi sebagai media menjembatani pengelolaan organisasi dengan pihak yang berkepentingan

⁴ Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Organisasi Nonlaba*, (Jakarta : Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE), 2012), hal. 1

(*stakeholders*). Laporan keuangan menjadi penting karena didalamnya memuat informasi mengenai bagaimana organisasi mengelola sumber daya yang ada, berapa besar sumber daya yang dimiliki serta pencapaian apa saja yang sudah diperoleh dengan sumber daya yang dimiliki.⁵

Maka organisasi nonlaba dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba. ISAK 35 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 April 2019, ISAK 35 berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Dengan menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar tersebut diharapkan organisasi nonlaba menyajikan informasi yang relevan. Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.⁶

Karena karakteristik organisasi nonlaba dengan organisasi bisnis yang berbeda, misalnya terletak pada cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan aktivitas operasional. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai transaksi yang jarang terjadi pada organisasi laba. Contohnya pada transaksi penerimaan sumbangan yang

⁵ Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan...*, hal. vi

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, “ ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba”, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/interpretasi-sak-30-isak-35-penyajian-laporan-keuangan-entitas-berorientasi-nonlaba>, (diakses pada 10 Januari 2022, pukul 09.00)

terjadi pada organisasi nonlaba yang jarang dijumpai bahkan tidak pernah terjadi pada organisasi bisnis. Dari karakteristik tersebut dapat berpengaruh pada laporan keuangan organisasi yang disusun berbeda dengan laporan keuangan yang disusun oleh organisasi bisnis.

Laporan keuangan dalam yayasan sangatlah penting keberadaannya, membantu dalam proses pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, serta menunjukkan keterkaitan keuangan dalam memilih beberapa *planning* yang ada, sehingga yayasan bisa memprediksi pengaruh dari keputusan dimasa yang akan datang. Selain itu laporan keuangan juga bisa digunakan untuk menilai kinerja organisasi, sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diputuskan suatu langkah-langkah strategis untuk pengelolaan lembaga nonlaba.

Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah termasuk organisasi nonlaba yang didirikan sejak tahun 2002. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, yaitu dengan memberikan santunan untuk anak yatim piatu dan dhuafa. Yayasan harus mampu menyediakan informasi terkait laporan pertanggung jawaban yang utuh dan benar. Penyajian seperti inilah yang menciptakan transparansi sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah dipertanggungjawabkan kepada para donatur, serta para anggota dan pihak lain yang berhubungan dengan yayasan.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini berdampak bagi berbagai sektor produk, bisnis, industri, maupun kebiasaan manusia. Covid-19 yang dikenal dengan Novel Coronavirus merupakan wabah yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan mulai menyebar ke Indonesia sejak Maret 2020. Untuk meminimalisir persebaran pandemi Covid-19 diberlakukannya kebijakan *social distancing*, atau yang lebih dikenal dengan *physical distancing* (menjaga jarak). Dengan adanya kebijakan tersebut sebagian besar para donatur dan penyumbang yayasan lebih memilih untuk menyumbang via transfer antar bank. Selain itu penyampaiannya laporan keuangan juga dilakukan secara *daring* untuk menghindari kerumunan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya masih belum menerapkan ISAK 35. Laporan yang dibuat pada Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah ini bisa dibilang masih sederhana. Oleh karena itu penyajian informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan dari yayasan ini masih belum sesuai dengan standar ISAK 35 yang terdiri dari lima macam laporan keuangan. Berikut bentuk laporan keuangan Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah tersebut,

Tabel 1.1
Pembukuan Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah
Februari 2020

Tgl	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	Saldo Bulan Januari 2020			Rp 44.769.000
3	Santunan Anak Yatim An. Wulan Untuk Pembayaran Uang Sekolah		Rp 100.000	Rp 44.669.000
3	Santunan Anak Yatim An. Nia Untuk Pembayaran Uang Sekolah		Rp 100.000	Rp 44.569.000
3	Santunan Anak Yatim An. Yosep Untuk Pembayaran Uang Sekolah		Rp 100.000	Rp 44.469.000
3	Santunan Anak Yatim An. Feery Untuk Pembayaran Uang Sekolah		Rp 100.000	Rp 44.369.000
3	Santunan Anak Yatim An. Bayu Untuk Pembayaran Uang Sekolah		Rp 100.000	Rp 44.269.000
3	Santunan Anak Yatim An. Bima Untuk Pembayaran Uang Sekolah		Rp 100.000	Rp 44.169.000
7	Dana Masuk Dari Donatur Tetap	Rp 350.000		Rp 44.519.000
8	Santunan Kematian An. Agus		Rp 150.000	Rp 44.369.000
30	Dana masuk dari donatur tetap	Rp 1.915.000		Rp 46.284.000
30	Dana Masuk Dari H. Endro Sugiri	Rp 300.000		Rp 46.584.000
30	Uang Transport Untuk Jasa Pemungut Dana Donatur Tetap		Rp 50.000	Rp 46.534.000

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 Pada Laporan Keuangan Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang Di Era Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ini dijawab dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi laporan keuangan pada Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah berdasarkan perspektif ISAK 35?
2. Hambatan apa saja yang dialami Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang dalam menyusun laporan keuangan di era pandemi Covid-19?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang dalam menyusun laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, ada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meneliti implementasi laporan keuangan pada Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah dengan acuan ISAK 35.

2. Untuk meneliti hambatan yang dialami Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah dalam menyusun laporan keuangan di era pandemi Covid-19.
3. Untuk memberikan solusi dalam mengatasi hambatan yang dialami Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang dalam menyusun laporan keuangan.

D. Identifikasi Penelitian dan Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pada hal yang akan diteliti, maka batasan masalah yang digunakan adalah penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Dengan menggunakan bukti transaksi, pencatatan kas masuk dan kas keluar dari Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan serta pengembangan ilmu. Dan bisa menjadi rujukan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba yang sesuai dengan ISAK 35.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi yayasan sebagai pertimbangan dan bahan evaluasi dalam pencatatan akuntansi keuangan untuk mengetahui pentingnya membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansinya agar dapat digunakan untuk pembuatan keputusan yayasan di tahun-tahun berikutnya.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan ilmu akuntansi keuangan berkenaan dengan standar akuntansi organisasi nonlaba.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu ilmu yang akan meningkatkan pemahaman, wawasan, dan sebagai dasar acuan untuk penelitian berikutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Organisasi nonlaba

Organisasi nonlaba adalah organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Keberhasilan yang hendak dicapai organisasi nonlaba bukan keuntungan secara materi, tetapi bukan berarti organisasi nonlaba tidak boleh menghasilkan keuntungan. Jika memperoleh

keuntungan pun akan disalurkan kembali untuk operasional organisasi.⁷

b. ISAK 35

Merupakan standar dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada para penyumbang dana, sehingga mengetahui dengan jelas pengalokasian dana yang disumbangkan.

c. Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang

Yayasan yang didirikan sejak tahun 2002 ini bertujuan memberikan pelayanan yang didasarkan pada kesejahteraan anak yatim, fakir miskin dan dhuafa.

d. Pandemi Covid-19

Covid-19 yang dikenal dengan Novel Coronavirus merupakan wabah yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan mulai menyebar ke Indonesia sejak Maret 2020. Covid-19 merupakan wabah yang menyerang saluran pernafasan pada manusia.

2. Definisi Operasional

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Laporan Keuangan

⁷ Nefi Siti Nurrahma, "Penerapan PSAK NO.45 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SMP Hikmah Teladan Bandung", Semar: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Rivi STIE Muhammadiyah Bandung, Vol. 1 No. 3, September 2019, hal. 3

Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang Di Era Pandemi Covid-19 adalah penelitian mengenai proses perbaikan dalam menilai penerapan ISAK 35 tentang penyampaian informasi keuangan organisasi nonlaba pada Yayasan Dharma Bakti Roudlotul Jannah Jombang di era pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, dan pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan serta menguraikan lebih mendalam tentang beberapa pokok yang terkait dengan tinjauan teoritis, mengenai organisasi nonlaba, pelaporan keuangan organisasi nonlaba, pelaporan keuangan organisasi nonlaba berdasarkan ISAK 35, yang digunakan sebagai pedoman dalam analisis dan pembahasan yang diharapkan dapat membantu dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 di yayasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) Lokasi Penelitian, (3) Kehadiran Peneliti, (4) Data dan Sumber Data, (5) Teknik Pengumpulan Data, (6) Teknik Analisis Data, (7) Pengecekan Keabsahan Temuan, (8) Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan materi-materi yang sudah diperoleh dari berbagai sumber, yang dipakai sebagai acuan dalam memaparkan topik permasalahan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan deskripsi data berdasarkan data dasar yang berhasil dikumpulkan, analisis kelemahan laporan keuangan yang disusun oleh yayasan, serta proses evaluasi laporan keuangan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan hasil analisis data yang diperoleh, keterbatasan penelitian dan saran-saran.